

Judul : Tutup ruang diskriminasi, lindungi hak-hak perempuan pekerja
Tanggal : Jumat, 29 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tutup Ruang Diskriminasi Lindungi Hak-hak Perempuan Pekerja



Tonny Tesar

ANGGOTA Komisi XIII DPR Tonny Tesar meminta perlindungan nyata bagi perempuan di ruang publik, khususnya bandara, agar tidak menjadi korban pelecehan maupun ancaman keamanan. Pekerja perempuan di bandara mesti terlindungi dari diskriminasi maupun kekerasan seksual di lingkungan kerja.

"Pelecehan itu terjadi di mana-mana, dan perempuan selalu menjadi korban. Ini bukan hanya soal pelecehan seksual, tetapi juga menyangkut keamanan dan kenyamanan kerja," ujar Tonny dalam audiensi Komisi XIII DPR dengan Badan Pengurus Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (FSPBI) di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Ia menambahkan, Komisi XIII DPR akan terus memperjuangkan keadilan dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual di seluruh bandara Indonesia. "Ada satu poin penting, yaitu perlindungan Pemerintah secara inklusif kepada perempuan di bandara mana pun," tegasnya.

Politikus Partai NasDem itu bahkan mengusulkan agar pekerja perempuan tidak dijadwalkan bekerja malam

hari karena rawan pelecehan. "Kalaupun harus kerja malam, sebaiknya bisa dilakukan dari rumah," imbuhnya.

Senada, anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah menyampaikan keprihatinan atas kondisi pekerja perempuan di bandara yang dinilai kurang mendapat perlindungan. Ia menyoroti jam kerja malam yang rentan, apalagi tanpa fasilitas transportasi memadai.

"Mungkin jam dua malam mereka masih bertugas, tetapi tidak ada jaminan perlindungan maupun transportasi," kata legislator dari PDIP itu.

Ia mendesak pengelola bandara dan BUMN terkait untuk bertanggung jawab penuh atas hak-hak pekerja perempuan. Fasilitas dasar seperti ruang laktasi, cuti haid, penitipan anak, dan perlindungan dari kekerasan seksual wajib tersedia.

Ia juga menekankan perlunya data konkret kasus pelecehan agar DPR bisa mengambil langkah lebih efektif. "Kami prihatin terhadap kondisi pekerja perempuan bandara, dan Komisi XIII akan berupaya memperbaikinya," ucap Siti.

Anggota Komisi XIII DPR Maruli Siahaan menegaskan pentingnya kejelasan data dan fakta dalam setiap aduan terkait pelecehan seksual. Pasalnya, kasus pelecehan sudah masuk ranah pidana sehingga harus didukung bukti konkret, identitas korban, serta status laporan hukum.

"Data harus jelas dan terverifikasi. Kalau sudah disebut pelecehan seksual, itu masuk ranah pidana," ujar purnawirawan Kombes Pol itu.

Maruli menambahkan, fokus Komisi XIII adalah isu Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga kasus pelecehan perempuan di bandara harus menjadi perhatian bersama, termasuk dengan mitra kerja seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK. ■ PYB